

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kurikulum Pesantren Salaf

1. Definisi Kurikulum Pesantren Salaf

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diartikan sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan pelajaran, isi dan tujuan termasuk cara atau strategi yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Tujuan ini mencakup tujuan pendidikan nasional, kesesuaian dengan keadaan dan potensi daerah, satuan pendidikan serta peserta didik.

Kurikulum pesantren menurut Kafrawi yang dikutip Guntur merupakan nilai-nilai pendidikan yang didapat oleh santri melalui keseluruhan aktivitasnya di pesantren.²⁰ Pendapat ini mengindikasikan bahwa definisi kurikulum pesantren tidak terbatas pada materi pelajaran di ruang kelas, namun juga di luar pelajaran. Namun jika ditinjau dari mata pelajaran yang diberikan secara formal oleh kiai, maka kurikulum pesantren dapat dibatasi pada ilmu agama dengan seluruh cabang-cabangnya.

Regulasi mengenai kurikulum pesantren sendiri telah dirumuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren.²¹ Bagian ketiga pada KMA ini menjelaskan mengenai kurikulum pesantren, dimana pada pasal 13 dan 14 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan *muadalah salafiyah* dan pendidikan *muadalah muallimin* dikembangkan

¹⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional, Jakarta: Lembaran Negara RI, 2013.

²⁰ Cahaya Guntur Kesuma, "Pesantren Dan Kepemimpinan Kyai," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 1, no. 1 (2014): 99–117.

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

pesantren yang dirumuskan oleh Majelis *Masyayikh*. Oleh karena itu tidak ada kesamaan mengenai kajian kitab dan juga kurikulum antara pesantren satu dengan pesantren lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum pesantren sangat variatif, dimana kurikulum pesantren satu berbeda dengan pesantren yang lain. Sehingga ada ciri khas tertentu pada cabang ilmu yang diunggulkan pada masing-masing pesantren. Fakta ini menunjukkan bahwa pesantren yang berkembang di Indonesia bersifat dinamis karena seiring berjalannya waktu pesantren juga bersinggungan dengan perkembangan zaman sehingga mempengaruhi pola pendidikannya.

Meskipun kurikulum pesantren tidak dibatasi oleh pemerintah, namun Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) tetap memberikan pedoman pemetaan kurikulum pesantren. Melalui *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan di Jakarta 18 Agustus 2020, Direktur PD Pontren Waryono mengungkapkan setidaknya kurikulum pesantren harus memiliki tujuh fungsi, antara lain:

a. Fungsi Kesesuaian

Kurikulum pesantren harus memiliki kesesuaian, yakni sesuai dengan kebutuhan zaman. Sebagai contoh fiqih tentang *toharoh*, meski menggunakan kitab safinah namun harus sesuai dengan kebutuhan zaman.

b. Fungsi Integrasi

Kurikulum harus menyesuaikan konteks, yakni bisa membantu memberikan pemahaman dan mendekatkan santri dengan masyarakat. Karena jika kurikulum tidak mampu membantu santri mengenali kebutuhan masyarakat, maka akan menjadikan santri berpotensi terasing dan terkesan eksklusif.

c. Fungsi Diferensiasi

Kurikulum harus menjadi pembeda, dimana kurikulum pesantren harus mengakomodir kekhasan keilmuan Kiainya. Pembeda inilah yang menjadi keunikan pesantren.

- d. Fungsi menyiapkan santri untuk bisa berkiprah dan hidup di masyarakat. Kurikulum pesantren harus bisa membantu santri mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa terjun ke masyarakat.
- e. Fungsi Pemilihan
Santri bisa memilih kurikulum yang disediakan pesantren yang sesuai dengan dirinya.
- f. Fungsi Diagnostik
Kurikulum diharuskan untuk bisa mendiagnosa transformasi yang terjadi di masyarakat seiring perkembangan zaman. Fungsi diagnostik ini penting adanya karena untuk mempersiapkan santri agar bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan bertahan hidup.
- g. Fungsi Dialogis
Kurikulum harus bisa mendialekkan tulisan abad ke 5 Hijriah berupa kitab kuning dengan peristiwa yang terjadi saat ini.²²

2. Tujuan Kurikulum Pesantren Salaf

Tujuan pendidikan pesantren salaf menyesuaikan perkembangan pesantren yang dirumuskan oleh Kiai sendiri atau dibantu oleh dewan *Masyayikh*.²³ Pemilihan tujuan secara *instingsif* merupakan hal yang bisa mengingat perbedaan kapasitas kiai yang melebihi manusia biasa dalam hal ilmu dan amal. Selain itu kiai sebagai pendiri pesantren memiliki hak penuh atas lembaganya, sehingga penentuan tujuan kurikulum yang *instingsif* merupakan ciri khas dari pendidikan pesantren.

Tujuan utama pesantren menurut Dian Nafi' adalah mencapai kebijaksanaan dalam memahami realitas kehidupan serta peran dan tanggung jawab santri berdasarkan ajaran Islam.²⁴ Tujuan umum dari

²² "Kemenag Petakan Kurikulum Pesantren", <https://kemenag.go.id/read/kemenag-petakan-kurikulum-pesantren-zma0l>, 18 Agustus 2020, diakses tanggal 19 Maret 2022.

²³Nurcholish Madjid, "Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren", dalam Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), 65.

²⁴ Darul Abror, *Kurikulum Pesantren (Model Integrasi Pembelajaran Salaf Dan Khalaf)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020),27.

pendidikan pesantren meliputi melatih dan mempertinggi semangat, mengajarkan perilaku jujur dan bermoral, meninggikan budi perkerti, menghargai nilai spiritual dan kemanusiaan, serta mempersiapkan santri untuk hidup sederhana dan membersihkan hati.²⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan umum pendidikan pesantren adalah mendidik dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan santri hingga menjadi *insan kamil*.²⁶ iInsan kamil yang dimaksud disini adalah menjadikan santri sebagai manusia yang cerdas secara intelektual, beriman, beretika, bertaqwa serta dapat mengikuti perkembangan zaman, budaya dan masyarakat. Tujuan khusus dari pendidikan pesantren menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pesantren itu berada. Sehingga tujuan khusus tiap pesantren berbeda antara satu dengan yang lainnya.

3. Materi Kurikulum atau Bahan Ajar Pesantren Salaf

Kurikulum yang diajarkan di pesantren bersumber dari kitab kuning atau kitab klasik. Kitab kuning menempati posisi yang istimewa dalam kurikulum pesantren.²⁷ Adapun kitab klasik ini digolongkan menjadi delapan kelompok, antara lain ushuf fiqh, fiqh, nahwu dan sharaf, tauhid, tafsir, hadits, akhlak, tasawuf, balaghah, tarikh atau sejarah.²⁸

Dari segi materi kitab kuning yang dijadikan rujukan kurikulum pesantren dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kelompok pelajaran dasar seperti Al-Qur'an dan Hadits beserta ilmu yang lahir dari keduanya. Kedua, kelompok kitab kuning yang tidak termasuk ajaran agama Islam, namun

²⁵ Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Cetakan ke-IV (Jakarta: LP3ES, 1994), 21.

²⁶ Mutohar Ahmad and Anam Nurul, *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam Dan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 88.

²⁷ Mayoritas kitab klasik atau kitab kuning yang diajarkan di pesantren di Madura dan Jawa memiliki kesamaan, baik jenis kitab penyebaran ilmu, maupun metode yang digunakan, yakni dengan sistem bandongan atau klasikal dan sorogan atau perseorangan. Persamaan inilah yang menghasilkan homogenitas kultur, praktik keagamaan dan pandangan hidup santri di Madura dan Jawa. Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Cetakan IV, (Jakarta: LP3ES, 1994), 51.

²⁸ Ibid, 50

kajiannya merupakan hasil perkembangan sejarah Islam, seperti kitab yang membahas kebudayaan, metode keilmuan dan lembaga kemasyarakatan.²⁹

Dalam perspektif sejarah, bahan ajar yang digunakan pada pesantren salaf didesain sesuai dengan figur keilmuan kiai serta kebutuhan santri pada masanya. Mengutip pendapat dhofier mengemukakan bahwa kitab yang diajarkan di pesantren dibagi menjaditiga golongan, yakni kitab dasar, menengah dan tingkat tinggi. Kitab yang diajarkan meliputi nahwu, sharaf, usul fiqh, hadis, fiqh, tafsir, tauhid, etika dan tasawuf.³⁰ Sedangkan menurut Madjid kitab yang diajarkan di pesantren berupa nahwu-sharaf, fiqh, 'aqaid, tasawuf, tafsir, hadis, bahasa arab dan fundamentalisme. Di sisi lain, Zainuddin dan Tuwah mengkategorikan kurikulum pesantren dengan materi akidah/tauhid, tajwid, al qur'an (tafsir), ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis dan tarikh.

Abror menambahkan jika masing-masing komponen kitab biasanya sudah disesuaikan dengan jenjang dengan memperhatikan penguasaan agama secara menyeluruh, sehingga dalam implementasinya setidaknya memperhatikan fleksibilitas program pembelajaran, berorientasi pada tujuan, efektif dan efisien, serta kontinuitas.³¹

4. *Manhaj* dan Metode Pembelajaran Pesantren Salaf

Kurikulum pesantren berbeda dengan kurikulum pendidikan formal. Jika kurikulum yang dimaksud sebagaimana definisi kurikulum pendidikan formal maka di pesantren lebih dikenal sebagai *manhaj* atau arah pembelajaran, yakni berupa pembelajaran yang diambil dari *funun* kitab-kitab yang diajarkan pada santri. Menurut Hasbullah yang dikutip oleh Abror muatan *manhaj* pesantren lebih merujuk pada ilmu agama, seperti

²⁹ Abror, *Kurikulum Pesantren: Model Integrasi Pembelajaran Salaf Dan Khalaf*, 51.

³⁰ Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, 88.

³¹ Abror, *Kurikulum Pesantren: Model Integrasi Pembelajaran Salaf Dan Khalaf*, 51.

bahasa arab, hukum Islam, hadits, tafsir, teologi, tasawuf, tarikh dan retorika.³²

Manhaj yang digunakan di pesantren dilakukan dengan memberikan pengajaran kitab kuning, dimana akhir pembelajaran berstandar pada tamatnya kitab yang dipelajari, bukan pada pemahaman secara tuntas untuk suatu topik tertentu (*maudhlu'i*). Sedangkan penamaan penjenjangan tiap pesantren berbeda, seperti *marhalah*, *sanah* dan lainnya. Ada juga yang menemai penjenjangan menyerupai pendidikan di madrasah formal, seperti *Ula*, *Wustha* dan '*Ulya* atau menggunakan istilah *Ibtida'i*, *Tsanawy* dan '*Aly*.

Metode pembelajaran yang diterapkan di kalangan pesantren salafi, secara rinci dapat meliputi beberapa metode. Dalam hal ini, metodologi pembelajaran pada Pesantren Salaf meliputi (1) Sorogan, (2) Wetonan atau bandongan, (3) Halaqoh, (4) Hafalan atau tahfiz, (5) Hiwar atau musyawarah, (6) Bahtsu al-masa'il (Mudzakarah), (7) Fathul Kutub, (8) Muqoronah dan (9) Muhawarah / Muhadasah.³³ Berikut tabel penjelasan singkat terkait metode pembelajaran pesantren.

No	Metode Pendidikan Pesantren Salafi	Keterangan
1	Wetonan	Metode mengajar dimana santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kiai yang menerangkan pelajaran
2	Sorogan	Metode dimana santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya
3	Hafalan	Metode dimana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya
4	Halaqah	Dikenal juga dengan istilah munazharah sistem ini merupakan kelompok kelas dari sistem bandongan

³² Abror.,39.

³³ Metode-metode pembelajaran tersebut tentunya belum mewakili keseluruhan dari metode-metode pembelajaran yang ada di pondok pesantren, tetapi setidaknya paling banya diterapkan pada lembaga pendidikan tersebut. Ali Ridlwan Nurma, *Manajemen Pondok Pesantren: Upaya Preventivisasi Kemunculan Dan Merebaknya Aliran Keagamaan Menyimpang* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018),45.

5	Hiwar	Hampir sama dengan metode diskusi yang umum kita kenal selama ini. Bedanya metode hiwar ini dilaksanakan dalam rangka pendalaman atau pengayaan materi yang sudah ada pada santri
6	Bahtsul Masa'il	Merupakan pertemuan ilmiah, yang membahas masalah diniyah, seperti ibadah, aqidah dan masalah agama pada umumnya
7	Fathul Kutub	(Cara memahami kitab) merupakan latihan membaca kitab (terutama kitab klasik), sebagai wahana menguji kemampuan mereka setelah mensantri
8	Muqaranah	Sebuah metode yang terfokus pada kegiatan perbandingan, baik perbandingan materi, pemahaman, metode maupun perbandingan kitab
9	Muhadatsah	Latihan bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa arab
10	Lalaran	Membaca pelajaran atau <i>nadlom-nadlom</i> yang sudah dipelajari dengan menggunakan lagu-lagu sehingga mudah dihafal

5. Karakteristik Pesantren Salaf

Pesantren salaf sebagai lembaga pendidikan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Karakteristik pesantren salaf dapat dilihat dari a) Pendidikan pesantren identik dengan *ngalap barokah* kiai; b) Kitab kuning dominan sebagai bahan rujukan; c) Metode klasik implementatif yang istiqamah; serta d) Pengembangan *life skills* santri.

Belajar di pesantren bukan hanya sekedar mencari ilmu, namun juga mengharap berkah dari kiai. Mastuhu mengungkapkan bahwa kiai merupakan figur sentral atas maju atau mundurnya sebuah pesantren, baik dalam bidang pendidikan, penguasaan, pengetahuan santri atau pengetahuan keagamaan masyarakat sekitar pesantren.³⁴

Praktik pendidikan di pesantren tidak luput dari "*ngalap barokah kiai*". Menurut Bakri *barokah* dapat diartikan sebagai berkat atau selamat.

³⁴ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),255.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan berkah. *Ngalap berkah* dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari manfaat dan kebaikan yang dicari manusia.³⁵

Seorang santri akan merasa bahagia dan bangga ketika disuruh atau diajak bersama kiainya. Bahkan hukuman dari kiai diinsadi sebagai *barokah* dan wujud kepedulian kiai terhadap santri. *Barokah* kiai dianggap lebih penting daripada ilmu yang diterima santri. Ilmu tanpa *barokah* dipercaya akan menjadi ilmu yang kurang bermanfaat, dan sebaliknya.³⁶ Mastuhu menambahkan bahwa *barokah* kiai didapatkan ketika membantu kiai, baik menjadi lurah pondok, santri senior, serta para *khadam* yang mengabdikan dirinya di pesantren. Kesabaran dan keuletan dalam menyelesaikan masalah adalah salah satu ciri khas yang harus dimiliki oleh santri guna mendapat *barokah* kiai. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari unsur kekharisman sang kiai.³⁷

Pesantren salaf memiliki budaya berbeda yang dijadikan salah satu pemberdaya potensi dan etos santri dalam mencari ilmu. Keterampilan santri di pesantren tumbuh karena amotivasi, etos dan budaya yang telah ada di pesantren itu sendiri. Mulai dari penciptaan aktivitas non teknologis maupun aktivitas full teknologi. Seperti mengelola ternak pesantren, sawah, menjahit, membantu di dapur pesantren, ikut membantu pembangunan pondok dan sebagainya. Selain itu, pesantren tidak ketinggalan dengan mengasah otak dan kemampuan santri dengan memanfaatkan teknologi, seperti yang dilakukan pesantren Lirboyo Kediri, yakni menerbitkan majalah bulanan Misykat. Hal ini menjadi bukti bahwa pesantren salaf tidak ketinggalan zaman dan siap terjun di era global dengan tetap mengedepankan *akhlakul karimah*-nya.³⁸

³⁵ Abror, *Kurikulum Pesantren (Model Integrasi Pembelajaran Salaf Dan Khalaf)*, 49.

³⁶ Ibid.

³⁷ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), 32.

³⁸ Ibid, 55.

Keterampilan santri juga tumbuh subur dalam bidang bisnis. Hal ini dapat diamati dari adanya bentuk komunikasi antara pesantren dengan masyarakat yang saling membutuhkan dalam konteks ekonomi, sehingga keterampilan bisnis santri dapat terasah. Dengan demikian, pesantren saalaf memberikan peluang bagi santrinya untuk berkarya sesuai potensi yang dimiliki santri dengan tetap membangun komunikasi efektif dengan masyarakat sekitar. Keterampilan yang diperoleh santri ini dipersiapkan untuk menjadi bekal mereka ketika lulus, sehingga kelak ketika mengabdikan di masyarakat dengan mengamalkan ilmu agamanya, mereka juga dapat *survive* untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.³⁹

B. Manajemen Kurikulum Pesantren

Manajemen kurikulum berkenaan dengan bagaimana kurikulum dirancang, diimplementasikan dan dievaluasi kemudian disempurnakan, oleh siapa, kapan dan dalam lingkup mana. Manajemen kurikulum juga berkaitan dengan pemberian wewenang kepada siapa yang diamanatkan tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kurikulum.⁴⁰

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional. Seluruh kegiatan pembelajarannya bertujuan untuk mengajarkan kepada santri mengenai Islam sebagai cara hidup. Secara substansif pendidikan pesantren telah memuat ajaran-ajaran mengenai moderasi beragama.

Regulasi mengenai moderasi agama telah dirumuskan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 tahun 2019 tentang pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam.⁴¹ Muatan moderasi beragama dalam proses pendidikan di pesantren

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta : Bumi Aksara, 2015. 25.

⁴¹ *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

sebenarnya hampir dipastikan tidak ada masalah. Ajaran mengenai moderasi beragama ini berkaitan dengan cara pandang yang mendalam mengenai agama. Sedangkan di pesantren, santri sudah memperoleh pengajaran agama yang lebih baik. Moderasi beragama melekat didalam tata cara pengajaran ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan dan diimplementasikan di lingkungan pesantren. Implementasi moderasi beragama di lingkungan pesantren lebih ditekankan pada aspek konsistensi pada penerapan standar pengajaran yang ada.

Sehingga manajemen kurikulum sebenarnya sudah terimplementasikan dalam tubuh kurikulum pesantren itu sendiri, dimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasannya harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam moderasi beragama.⁴² Adapun prinsip-prinsip moderasi beragama ini meliputi mengambil jalan tengah atau *tawassuth*, berkeseimbangan atau *tawāzun*, lurus dan tegas atau *i'tidāl*, toleransi atau *tasāmuḥ*, egaliter atau *musāwah*, musyawarah atau *syurā*.⁴³

1. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan menurut Su'ud dan makmun yang dikutip Dinn Wahyudin merupakan rangkaian proses sistematis penyiapan keputusan mengenai apa yang diharapkan akan terjadi dan apa yang akan dilakukan.⁴⁴

Beane menyatakan *curriculum planning is a process in which participants at many levels make decisions about what the purpose of learning ought to be, how the purpose might be carried put through teaching-learning situation, and whether the purposes and means are both appropriate and affective.*

⁴² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 1st ed. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019),100.

⁴³ Suprpto Suprpto, "Integrasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18, no. 3 (2020): 355, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i3.750>.

⁴⁴ Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),81.

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan untuk memperoleh hasil optimal dari sebuah kurikulum diperlukan perencanaan yang matang, mulai dari desain, pelaksanaan, pengorganisasian hingga pengawasannya.

Perencanaan kurikulum harus memperhatikan beberapa hal, seperti siapa penanggung jawab perencanaan dan bagaimana perencanaan kurikulum tersebut dilaksanakan secara profesional.⁴⁵

Masalah yang pertama, siapa penanggung jawab perencanaan kurikulum dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kurikulum. Pendekatan dalam perencanaan kurikulum sendiri memiliki dua bentuk. Pendekatan pertama bersifat *administrative approach* atau lebih dikenal sebagai *from top to down* yakni perencanaan kurikulum dilakukan oleh atasan kemudian diserahkan pada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru. Pendekatan ini tidak melibatkan guru sebagai perencana, mereka hanya sebagai penerima pasif serta pelaksana semua gagasan, ide dan inisiatif yang berasal dari atasan.⁴⁶ Pendekatan yang kedua adalah *grass roots approach*, merupakan kebalikan dari *administrative approach*. Perencanaan di pendekatan ini dimulai dari bawah, yakni semua guru atau sekolah secara individual yang kemudian dapat meluas ke sekolah lainnya. Guru bersama kepala sekolah merancang kurikulum dengan melihat kekurangan dan kelebihan dari kurikulum yang ada. Kemudian mengembangkan ide-ide baru untuk diterapkan di sekolah mereka guna meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini berdasarkan pandangan dari J.G Owen yang menekankan perlunya ketelibatan guru dalam perencanaan kurikulum atau *the teacher as manager*.

Masalah yang kedua, tentang bagaimana perencanaan kurikulum secara profesional, J.G Owen mengarahkan pada bagaimana menganalisis faktor yang mempengaruhi perencanaan kurikulum.⁴⁷ Faktor yang

⁴⁵ Komariah Nur, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, I (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021),110.

⁴⁶ Ibid., 111

⁴⁷ Ibid

mempengaruhi perencanaan kurikulum berupa faktor filosofis, psikologis, sosial budaya, teknologi, politis, sumber daya alam dan sumber daya manusia juga perlu dipertimbangkan.⁴⁸

Menurut Dakir yang dikutip oleh Dinn Wahyudin, perencanaan kurikulum harus memperhatikan landasan dasar sebagai berikut:

- a. Landasan filosofis
Perencanaan kurikulum hendaknya menyesuaikan falsafah yang dianut oleh negara dan bangsanya, atau dalam arti praktisnya merupakan pandangan hidup.
- b. Landasan psikologis
Pertimbangan terhadap aspek psikologis peserta didik dalam proses perencanaan kurikulum sangat penting untuk dilakukan. Maksudnya adalah dengan memperhitungkan hal yang berkaitan dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.
- c. Landasan sosiologis
Gejala sosial budaya di suatu masyarakat meliputi keadaan masyarakat, kebudayaan beserta perkembangan dan perubahannya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan kurikulum.
- d. Landasan ilmu penerahan dan teknologi
Pertimbangan terakhir adalah perkembangan IPTEK, hal ini bertujuan agar kurikulum yang dihasilkandapat menyesuaikan, mengakomodasi dan mengikuti perkembangan IPTEK sesuai kebutuhan zaman.⁴⁹

Rusman menambahkan, pada perumusan tujuan kurikulum terdapat tigasumber yang mendasarinya, yakni (a) sumber empiris, berkaitan dengan tuntunan hidup masa kini, (b) sumber filosofis, acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga dapat menjembatani keberhasilan peserta didik, acuan menganalisis, pengambilan pertimbangan dan keputusan, serta merumuskan hasil yang dikehendaki sesuai kondisi

⁴⁸ Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),83.

⁴⁹ *Ibid.*,82.

yang ada, (c) sumber bahan pelajaran, sumber yang umum digunakan untuk merumuskan tujuan kurikulum, berupa pelibatan ahli disiplin ilmu dalam merumuskannya.⁵⁰

Hafni Ladjid mengemukakan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum pada lembaga dibagi menjadi 3 tahapan, yakni : (a) perumusan tujuan institusional, (b) tahap pengembangan setiap bidang studi, (c) pengembangan program pengajaran di kelas.⁵¹

Dalam perencanaan kurikulum, terdapat aspek yang menjadi karakteristik perencanaan, antara lain:

- a. Kurikulum harus direncanakan berdasarkan konsep yang jelas dengan memperhatikan kondisi masyarakat sekarang, masa depan, kebutuhan dasar manusia sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik.
- b. Kurikulum harus direncanakan dan dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, mengoordinasi dan mempertimbangkan unsur esensial belajar mengajar yang efektif.
- c. Perencanaan kurikulum harus bersifat antisipatif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.
- d. Tujuan pendidikan harus mencakup kebutuhan dan minat individu dan masyarakat.
- e. Rumusan harus konkrit, guna menghindari kesalahan persepsi dan kontradiktif.
- f. Evaluasi secara berkelanjutan diperlukan dalam perencanaan kurikulum.
- g. Perlunya merespon dan mengakomodasi perubahan, perkembangan dan pertumbuhan peserta didik pada setiap jenjang sekolah.⁵²

2. Pengorganisasian Kurikulum

Organisasi kurikulum, yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid, merupakan suatu dasar yang

⁵⁰ Muhammad Kristiawan, Dian Safitri, dan Rena Lestari, *Manajemen Pendidikan*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017),87.

⁵¹ Ladjid Hafni, *Pengembangan Kurikulum* (Tangerang: Quantum Teaching, 2005),16.

⁵² Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, IV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya dan cara menyajikannya kepada murid-murid.⁵³

Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Adapun dalam penyusunan pengorganisasian kurikulum harus memperhatikan faktor-faktor berikut:

a. Ruang lingkup (*Scope*)

Merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

b. Urutan bahan (*Sequence*)

Berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Urutan bahan meliputi dua hal yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan pengalaman belajar yang memerlukan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu.

c. Kontinuitas

Berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran, pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif .

⁵³ Arfandi and Munif Shaleh, "Tahapan-Tahapan Dalam Manajemen Kurikulum Pada Lembaga Pendidikan Islam," *EduPedia* 2, no. 2 (2018): 63–71, <https://doi.org/10.35316/edupedia.v2i2..332>.

d. Keseimbangan

Adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada siswa. Keseimbangan dalam kurikulum dapat ditinjau dari dua segi yakni keseimbangan isi atau apa yang dipelajari, dan keseimbangan cara atau proses belajar.

e. Integrasi atau keterpaduan

Berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya, setelah siswa menyelesaikan program pendidikan disekolah.⁵⁴

Komariah membagi organisasi kurikulum menjadi empat bentuk, antara lain :

a. *Separated Subject Curriculum* (Kurikulum Berdasarkan Mata Pelajaran Terpisah)

Kurikulum ini disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam *subject* atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkungannya. Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Dalam praktek penyampaian pengajarannya, tanggung jawab terletak pada masing-masing guru atau pendidik yang menangani suatu mata pelajaran yang dipegangnya.

Kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah ini lebih bersifat *subject centered*, berpusat ada bahan pelajaran daripada *child centered* yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Dari segi ini jelas kurikulum

⁵⁴ Teguh Triwiyanto, "Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran" (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),89.

bentuk terpisah sangat menekankan pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan.

Zainal Arifin yang dikutip oleh Lismina memberikan ciri-ciri organisasi kurikulum jenis mata pelajaran terpisah, antara lain:

- 1) Masing – masing mata pelajaran berdiri sendiri dan terdiri dari sejumlah mata pelajaran terpisah.
- 2) Setiap mata pelajaran diberikan pada waktu yang telah direncanakan.
- 3) Tujuan utamanya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya.
- 4) Kurikulum dikelompokkan tidak berdasarkan pada minat, kebutuhan dan masalah yang dihadapi peserta didik.
- 5) Bentuk kurikulumnya tidak memperhatikan masalah, tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat.
- 6) Metode mengajar menggunakan sistem penguasaan sehingga menimbulkan perbedaan individual di kalangan peserta didik.
- 7) Siswa pasif dan guru berperan aktif.
- 8) Siswa tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum kooperatif
- 9) Pelaksanaan penilaian mayoritas menggunakan tes dengan berfokus pada dimensi kognitif peserta didik.⁵⁵

Menurut Suryobroto keunggulan *separated subject curriculum* berupa:

- 1) Penyajian bahan ajar yang sistematis dan logis.
- 2) Pengorganisasian yang bersifat sederhana sehingga memudahkan untuk mengurangi atau menambahkan mata pelajaran sesuai yang dibutuhkan.
- 3) Mudah untuk melakukan tes dan evaluasi.
- 4) Bisa diterapkan pada semua jenjang.
- 5) Sudah menjadi tradisi lama.
- 6) Mudah diaplikasikan oleh pendidik.

⁵⁵ Lismina, *Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi* (Ponorogo: Wais Inspirasi Indonesia, 2018), 96-97.

- 7) Memudahkan perubahan
- 8) Penyusunan sistematis.⁵⁶

Disamping kelebihan ada pula kelemahannya, antara lain : (1) pemisahan mata pelajaran tidak akan sesuai dengan kondisi realitas yang dihadapi peserta didik, (2) mata pelajaran yang hanya berpedoman pada teks saja tidak memperhatikan masalah faktual peserta didik, (3) kurang diperhatikannya aspek psikologis peserta didik, (4) kurikulum yang berpusat pada pengembangan intelektual sehingga kurang memperhatikan perkembangan emosional dan pertumbuhan jasmani peserta didik, (5) mengutamakan penguasaan materi melalui hafalan dari pada pengembangan kemampuan berfikir, (6) kurikulum tidak inovatif.⁵⁷

b. *Correlated Curriculum* (Kurikulum Mata Pelajaran Terhubung)

Correlated curriculum adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, Tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Menurut Wahyudin hubungan antar mata pelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, insidental artinya secara kebetulan ada hubungan antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Misalnya mata pelajaran PAI disinggung tentang mata pelajaran psikologi dan sebagainya.

Kedua, menghubungkan secara lebih erat jika terdapat suatu pokok bahasan yang dibicarakan dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya masalah moral dan etika dibicarakan dalam mata pelajaran agama.

Ketiga, batas mata pelajaran disatukan dan difungsikan dengan menghilangkan batasan masing-masing mata pelajaran. Penggabungan antara beberapa mata pelajaran menjadi satu disebut sebagai broad field. Misalnya mata pelajaran bahasa merupakan peleburan dari mata pelajaran

⁵⁶ Komariah Nur, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, I (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 40.

⁵⁷ Komariah Nur, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, I (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 41.

membaca, tata bahasa, menulis, mengarang, menyimak dan pengetahuan bahasa.⁵⁸

Lismina menambahkan ada tiga jenis korelasi yang sifatnya bergantung jenis mata pelajarannya. Pertama, korelasi faktual, contohnya korelasi pelajaran sejarah dengan kesusastraan, dimana fakta dalam sejarah disajikan melalui tulisan karangan. Kedua, korelasi deskriptif, korelasi ini dapat diamari dari penggunaan generalisasi untuk dua atau lebih mata pelajaran yang diberlakukan. Contoh, mata pelajaran psikologi dapat dikorelasikan dengan sosiologi. Ketiga, korelasi normatif, korelasi ini hampir sama dengan korelasi deskriptif namun menekankan pada penggunaan prinsip moral sosial. Contoh sejarah dan kesusastraan dapat dikorelasikan dengan prinsip moral sosial dan etika.⁵⁹

Kelebihan penggunaan kurikulum ini adalah penghubungan antar mata pelajaran memudahkan peserta didik untuk memahami materi. Sementara kelemahan dari kurikulum ini adalah sulitnya menghubungkan mata pelajaran dengan masalah faktual di kehidupan sehari-hari, sehingga kurikulum jenis ini dianggap tidak cukup untuk membekali peserta didik menempuh pendidikan di perguruan tinggi.⁶⁰

c. *Integrated Curriculum* (Kurikulum Terpadu)

Kurikulum terpadu merupakan kurikulum yang menyajikan bahan ajar secara unit dan keseluruhan tanpa pemisah antar mata pelajaran. Lismina mencirikan *integrated curriculum* menjadi lima, antara lain: (1) semua hal yang dipelajari peserta didik merupakan satu kesatuan fakta yang berhubungan erat satu sama lain, (2) Pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik dipadukan dengan persoalan yang dihadapi di kehidupan bermasyarakat, (3) Membuka kesempatan warga sekolah untuk membangun

⁵⁸ Nur Wahyudin Nasution, *Strategi Pembelajaran*, ed. Asrul Daulay (Medan: Perdana Publishing, 2017), <https://doi.org/10.35542/osf.io/cr96u>.98.

⁵⁹ Lismina, *Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi*, 101.

⁶⁰ Komariah, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, 43.

hubungan yang erat dengan masyarakat, (4) Menuntut peserta didik untuk bekerja dan berfikir secara aktif baik secara individu atau kelompok, (5) Mudah menyesuaikan kurikulum dengan bakat, minat dan kemampuan peserta didik.⁶¹

Integrated curriculum dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni:

1) *Core Curriculum* (Kurikulum Inti)

Kurikulum inti merupakan kurikulum yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan peserta didik, mengembangkan integrasi, meningkatkan keaktifan belajar serta hubungan antar kehidupan dan belajar peserta didik.⁶² Kurikulum inti memiliki ciri khusus.

Pertama, penekanan pada nilai sosial dari universalitas kebudayaan.⁶³ Kurikulum inti harus bersifat normatif serta mampu merefleksikan keperluan utama dari sistem sosial.

Kedua, struktur kurikulum inti ditentukan dari masalah sosial dan peri kehidupan sosial. Struktur kurikulum ditentukan dari hasil penelitian dan penjelasan kondisi sosial. Aktivitas kurikulum ditentukan oleh minat peserta didik. Pada akhirnya kurikulum inti ditentukan oleh pengelompokan masalah sosial yang berdasarkan aktivitas sosial.⁶⁴ Lisma menambahkan karakteristik kurikulum inti adalah perencanaan dilakukan secara berkelanjutan dan direncanakan secara terus menerus. Kemudian isi kurikulum difokuskan untuk semua peserta didik, namun substansinya bersifat pribadi, problema dan sosial. Isi kurikulum dikembangkan berdasarkan kumpulan pengalaman yang saling berkaitan baik pengalaman sosial maupun pribadi.

⁶¹ Lismina, *Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi*, 81-82.

⁶² Lismina, 104.

⁶³ Unsur universalitas dalam kebudayaan memberikan kestabilan dan sebagai pemersatu masyarakat, inti dari universalitas merupakan nilai norma dan asasi yang mengendalikan aktivitas manusia. Sudjana Nana, *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 68.

⁶⁴ Nana, 69.

- 2) Kurikulum yang berdasarkan proses sosial dan fungsi kehidupan (*Social function and persistens situation*)

Pengorganisasian kurikulum yang dikembangkan berdasarkan lingkungan sosial peserta didik. Tujuannya agar apa yang dipelajari peserta didik memiliki kebermanfaatan secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya.⁶⁵

- 3) Kurikulum yang berpusat pada pengalaman dan kegiatan (*Eperience and activity curriculum*)

Pengembangan kurikulum dengan cara ini adalah menggali potensi peserta didik guna membentuk sejumlah pengalaman untuk membentuk kemampuan yang terpadu dengan lingkungan sosial peserta didik.⁶⁶

d. *Broad Fields Curriculum* (Fusi Mata Pelajaran)

Fusi mata pelajaran merupakan jenis organisasi kurikulum yang menyatukan mata pelajaran dengan menghilangkan batasnya sehingga memiliki kesatuan erat satu sama lain.⁶⁷ Contohnya mata pelajaran IPS merupakan peleburan dari sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan sejenisnya. Kelebihan dari fusi mata pelajaran adalah (1) membantu guru mengintegrasikan materi pelajaran, (2) membantu guru memberikan pengetahuan fungsional kepada peserta didik, (3) memungkinkan untuk memberikan materi pelajaran lebih banyak kepada peserta didik, (4) menekankan pada generalisasi dan prinsip dasar daripada informasi dan fakta, (5) menghindari metode menghafal.

3. Pelaksanaan Kurikulum

Langkah selanjutnya setelah melakukan perencanaan kurikulum adalah pelaksanaan kurikulum. *Oxford advance learner dictionary* mendefinisikan implementasi sebagai menerapkan sesuatu yang

⁶⁵ Komariah, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, 46.

⁶⁶ Komariah, 46.

⁶⁷ Ibid.

memberikan dampak. Menurut Joko Susiolo yang dikutip oleh Komariah mendefinisikan pelaksanaan merupakan suatu penerapan konsep, ide, inovasi dan kebijakan pada suatu tindakan praktis yang memberikan dampak baik berupa nilai, pengetahuan, ketampilan maupun sikap. Secara singkat pelaksanaan kurikulum adalah proses mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran sekolah.⁶⁸ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum merupakan proses implementasi konsep, ide, kebijakan dan inovasi dalam aktivitas pembelajaran yang berdampak pada penguasaan peserta didik pada kompetensi tertentu, baik berupa nilai, pengetahuan maupun keterampilan sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.

Menurut Oemar Hamalik pelaksanaan kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, antara lain:

- a. Pengembangan program kurikulum yang mencakup pengembangan program harian hingga tahunan, pengembangan remedial, serta bimbingan dan konseling untuk siswa.
- b. Pelaksanaan pembelajaran dimana guru sebagai fasilitator siswa harus mampu mengkondisikan lingkungan belajar yang baik untuk menunjang perubahan perilaku sesuai tujuan utama kurikulum.
- c. Evaluasi hasil belajar yang dilaksanakn sepanjang proses pelaksanaan kurikulum berjalan. Evaluasi ini meliputi penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikat, *benchmarking* serta penilaian program.⁶⁹

Oemar Hamalik juga menambahkan setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, antara lain:

- a. Karakteristik kurikulum, yakni mencakup bahan ajar, fungsi, sifat, tujuan dan ruang lingkup.

⁶⁸ Komariah, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, 133.

⁶⁹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, IV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 238.

- b. Strategi pelaksanaan/implementasi, yaitu cara yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum seperti penataran, lokakarya, sikusi profesi, semianr, penyediaan buku dan berbagai kegiatan yang lainnya.
- c. Karakteristik penggunaan kurikulum, meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai serta sikap guru terhadap kurikulum hingga kemampuannya dalam merealisasikan kurikulum dalam proses belajar mengajar.⁷⁰

Mulyasa juga menegaskan bahwa guru diharuskan untuk secara profesional merancang pembelajaran yang bermaksa sekaligus efektif, melakukan pengorganisasian pembelajaran, mengatur pendekatan yang akan digunakan serta membentuk kompetensi secara aktif dan menerapkan kriteria keberhasilan kepada siswa.⁷¹ Pendapat Mulyasa ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan Marsh yang menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, yakni dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru serta dukungan internal dalam kelas. Berbagai faktor yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan bahwa guru merupakan tokoh kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

Dalam pelaksanaan kurikulum setidaknya para pemangku kebijakan harus memperhatikan beberapa prinsip yang jadi acuannya. Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah:

- a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Output (peserta didik) harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum.
- b. Demokratisasi, proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab.

⁷⁰ Ibid.,239.

⁷¹ Mulyasa, *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 99.

- c. Kooperatif, agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait.
- d. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu.
- e. Mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan.⁷²

Selanjutnya, Komariah mengutip pendapat dari Hamid Syarif mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum, meliputi:

- a. Perolehan kesempatan yang sama. Setiap peserta didik berhak diberdayakan dengan cara yang demokratis dan adil. Pemberdayaan ini tidak memandang status ekonomi, sosial maupun budaya mereka. Mereka yang kurang mampu secara ekonomi berhak memperoleh kesempatan yang sama dengan yang mampu secara ekonomi. Mereka yang berbakat dan unggul juga berhak menerima pendidikan sesuai kemampuannya.
- b. Berpusat pada anak. Pelaksanaan kurikulum harus menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran. Kurikulum harus mampu menjadikan anak mandiri untuk bekerjasama, belajar hingga mampu menilai diri sendiri. Sehingga penting untuk diadakannya penialai yang komprehensif dan berkelanjutan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan kurikulum.
- c. Pendekatan dan kemitraan. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar peserta didik berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Sedangkan kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, orang tua, masyarakat, dunia

⁷² Komariah, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, 87.

kerja hingga perguruan tinggi menjadi faktor penunjang keberhasilan pencapaian pengalaman belajar peserta didik.

- d. Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Kurikulum yang sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat selanjutnya diserahkan kepada sekolah, selanjutnya untuk pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing sekolah.⁷³

Pelaksanaan kegiatan dan pengalaman belajar di pesantren dapat di peroleh melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, eksertrakurikuler dan *hidden curriculum*.

a. Kokurikurikuler

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang menunjang kegiatan intrakurikuler. Pelaksanaannya diluar jadwal intrakurikuler dengan tujuan agar santri bisa memahami dan memperdalam materi yang disajikan di intrakurikuler. Kegiatan ini dapat berupa pekerjaan rumah, penugasan atau tindakan lain yang terkait dengan materi di intrakurikuler yang harus dicapai oleh santri.

b. Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegaitan belajar mengajar terjadwal. Kegiatan ini bertujuan untuk meraih tujuan minimal pada masing-masing materi yang diajarkan. Karena terjadwal maka kegaitan ini bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh setiap santri. Program ini berisi berbagai kemampuan minimal dan dasar yang harus dimiliki oleh santri pada setiap tingkatan. Sehingga keberhasilan pendidikan ditentukan oleh ketercapaian tujuan kegiatan intrakurikuler ini.

c. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk *off-class session*. Kegaitan ini bertujuan untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minat santri dalam berbagai

⁷³ Komariah,82.

bidang. Santri bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler mereka dengan tidak mengesampingkan tugas belajar mereka pada kegiatan kokurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan memperluas pengetahuan santri, menunjang pencapaian tujuan institusional pesantren, menyalurkan bakat dan minat, serta membina santri secara paripurna. Kegiatan ekstrakurikuler pesantren salafi antara lain jam'iyah al-qurra, pidato, kesenian dan sebagainya.

d. *Hidden Curriculum*

Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi merujuk pada kegiatan yang dapat mempengaruhi berlangsungnya kegiatan pengajaran dan pendidikan. Dalam hal ini bisa meningkatkan bahkan melemahkan usaha pencapaian tujuan pendidikan. Konsep *hidden curriculum* merujuk pada praktik dan hasil persekolah yang tidak diuraikan dalam program kurikulum.⁷⁴

Hidden curriculum merupakan kurikulum yang tidak direncanakan. Subandijah yang mengutip dari Hilda Taba menyatakan "*curriculum i a plan for learning*", aktivitas dan pengalaman anak di sekolah direncanakan sedemikian rupa hingga menjadi kurikulum.⁷⁵

Kurikulum di pesantren salafi bukanlah sekedar susunan mata pelajaran, namun merupakan seluruh program pendidikan baik yang terencana maupun tidak direncanakan (*hidden curriculum*). Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pendidikan di pesantren salafi bukan berdiri sendiri, tetapi secara integral terhubung dengan tujuan pendidikan secara keseluruhan, yakni mencetak generasi ulama' yang bukan hanya sekedar tahuagama tetapi juga salhe, alim dan dapat mengayomi masyarakat. Perwujudan ini semua dapat dibentuk dari kegiatan pesantren berupa pembiasaan kemandirian dan jiwa sosialnya yang merupakan bentukan dari kurikulum tersembunyi.

⁷⁴ Ruslan, "Manajemen Implementasi Kurikulum 2013," *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 1, no. 1 (2014): 119–32.

⁷⁵ Nasbi, *Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis*, I.36 (2017), 318–30.

4. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.⁷⁶

Tahap evaluasi dapat mempengaruhi proses perencanaan manajemen yang akan datang, karena dengan pengawasan berarti dilakukannya evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan yang terjadi agar dapat diperbaiki pada proses manajemen ke depan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan sebaik-baiknya agar tujuan yang dicapai dapat direalisasikan.⁷⁷

Menurut Scriven yang dikutip oleh Komariah fungsi evaluasi dibagi menjadi dua, yakni fungsi formatif dan sumatif. Evaluasi memiliki fungsi formatif ketika diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan berfungsi secara sumatif ketika kurikulum sudah dianggap selesai pengembangannya atau evaluasi terhadap hasil.

Disisi lain Komariah sendiri membagi evaluasi menjadi empat jenis, yakni : fungsi formatif, fungsi diagnostik, fungsi sumatif dan fungsi penempatan penilaian hasil belajar. Evaluasi memiliki fungsi formatif jika bertujuan untuk perbaikan sistem pembelajaran. Berfungsi diagnostik ketika evaluasi bertujuan mengetahui faktor kesulitan belajar siswa dalam proses pembelajaran. Fungsi sumatif adalah ketika evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Fungsi penempatan penilaian hasil belajar adalah ketika evaluasi mempermasalahkan bagaimana pengajar

⁷⁶ Komariah, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, 147.

⁷⁷ Ibrahim Nasbi, "Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis," *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 318–30, <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4.274>.

dapat mengetahui sejauh mana tujuan dan hasil belajar peserta didik telah tercapai.⁷⁸

Abdul Majir membagi tujuan evaluasi kurikulum menjadi dua, antara lain sebagai penilai efektivitas, efisiensi dan relevansi program. Serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran. Sebagai alat bantu, evaluasi berfungsi sebagai upaya perbaikan program dan penentuan tindak lanjut pengembangan kurikulum.⁷⁹ Disisi lain Komariah membag tujuan kurikulum dalam enam aspek, (a) membantu menentukan efektivitas program, (b) menentukan keunggulan dan kelemahan program, (c) menentukan tingkat pencapaian atau keberhasilan hasil belajar peserta didik, (d) menentukan masukan guna memperbaiki program, (e) mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum, (f) menetapkan keterkaitan antra komponen kurikulum.⁸⁰

Lebih lanjut, Lismina menambahkan tujuan dari evaluasi kurikulum adalah untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, baik dari aspek relevansi, efektivitas, efisiensi hingga kelayakan dari program yang dilakukan.⁸¹

Prinsip evaluasi dibagi menjadi (a) tujuan tertentu, setiap program evaluasi terarah pada tujuan yang jelas dan spesifik, (b) bersifat objektif, harus sesuai kenyataan dan diperoleh dari instrumen yang benar, (c) bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi yang terdapat dalam lingkup kurikulum, (d) kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan keberhasilan program, (e) efisien dalam penggunaan tenaga, biaya, waktu dan peralatan penunjang lainnya namun dengan hasil yang maksimal, (f) berkesinambungan, berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum setelah dilakukan evaluasi.⁸²

⁷⁸ Komariah, *Pengantar Manajemen Kurikulum*,150.

⁷⁹ Majir Abdul, *Dasar Pengembangan Kurikulum* (Yogyakarta: Deepublish, 2017),134.

⁸⁰ Komariah, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, 149.

⁸¹ Lismina, *Pengembangan Kurikulum Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi*,145.

⁸² Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),25.

Jenis evaluasi kurikulum terbagi atas evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Pertama evaluasi reflektif, merupakan evaluasi yang memusatkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai ide. Kajian evaluasi ini adalah ide yang dijadikan landasan dan dikembangkan bagi kurikulum. Evaluasi ini dapat dilaksanakan dengan berbagai kemungkinan, antara lain (a) saat pertama kali ide ditemukan, (b) ketika kurikulum sebagai rencana akan dikembangkan, (c) saat kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis, (d) saat kurikulum sebagai kegiatan sedang dikembangkan.

Kedua, evaluasi rencana dilaksanakan ketika inovasi mulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah pengembangan kurikulum menghasilkan format tertentu.

Ketiga, evaluasi proses atau evaluasi implementasi kurikulum. Evaluasi ini fokus pada dimensi kurikulum sebagai kegiatan termasuk faktor yang mempengaruhinya, seperti sarana dan prasarana, sistem supervisi, lingkungan, orang tua, peserta didik, guru hingga kepala sekolah.

Keempat, evaluasi hasil berupa evaluasi hasil belajar. Dalam hal ini domain evaluasi hasil belajar mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.⁸³

⁸³ Komariah, *Pengantar Manajemen Kurikulum*, 154-156.